

**ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP
*SOCIAL SECURITY***

Chadziqatun Najilatil Mazda

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: mazdacha97@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga faktor bencana alam. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Baik itu berupa kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara hingga kondisi air yang kurang baik. Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pemindahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap *social security*. Baik untuk masyarakat di daerah eks ibu kota maupun di daerah ibu kota baru. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan historis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, berita maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik pemindahan Ibu Kota Negara untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan dampak positif terhadap *social security* bagi masyarakat baik di daerah eks Ibu Kota (DKI Jakarta) maupun untuk masyarakat di daerah Ibu Kota Negara baru (Kalimantan Timur).

Kata Kunci: Ibu Kota Negara; Pemindahan; *Social Security*.

Abstract

In Indonesia, there are various factors that take into consideration the need to relocate the Nation's Capital. These include social, economic, political, cultural, defense and security factors, to natural disasters. The socio-economic and population gap is one of the driving factors for the plan to relocate the capital city of Indonesia. The relocation of the Nation's Capital to outside Java aims to reduce the already very heavy ecological burden of the city of Jakarta. Whether it's in the form of population density, traffic jams, air pollution to unfavorable water conditions. Moving the capital city is not an easy thing because the capital city is the main city in social, economic, and political activities so that relocation errors have the potential to cause various problems. This study was conducted to determine the impact of relocating the Nation's Capital to social security. Both for people in the former capital city and in the new capital area. The research was conducted using a qualitative method using a historical approach. The data collection process is carried out by studying books, journals, news and other reading materials related to the topic of moving the Nation's Capital to be classified based on their respective subjects. The results showed that the relocation of the Nation's Capital was able to be a solution in solving the problems that occurred while at the same time providing a positive impact on social security for the community both in the former Capital City area (DKI Jakarta) and for the community in the new Nation's Capital area (East Kalimantan).

Keywords: *the Nation's Capital; Relocation; Social Security.*

A. Latar Belakang

Ibu kota mempunyai fungsi strategi, ibu kota selalu menjadi target utama dalam situasi peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar kekuatan musuh atau penentang, paling tidak menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti yang terjadi di China pada masa lalu, di mana pemerintahan tersentralisir dengan sedikit fleksibilitas pada tingkat provinsi, suatu Dinasti dapat runtuh dengan ambruknya ibu kota. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan tujuan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus (Sutikno, 2007).

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam. Beberapa diantaranya, *pertama*, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. *Kedua*, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. *Ketiga*, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Shanghai. *Keempat*, akibat menurunnya dinasti atau budaya, Ibu Kota yang ada menjadi pudar dan

kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia (Yahya, 2018).

Di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya Ibu Kota Negara dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Juga karena kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki (FISIP UI, 2020).

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang

sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk (FISIP UI, 2020).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibu kota tersebut, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memindahkan ibu kotanya. Tetapi sebelum itu dilakukan perlu ada analisis kuat dari berbagai aspek bidang, dari aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan. Atau ibu kota negara tetap di suatu daerah tetapi pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar daerah tadi (Ridho, 2020).

Namun demikian, dua perkembangan telah menarik dari pemindahan ibu kota kembali ke ranah publik dan akademik. *Pertama*, perkembangan kota yang pesat, integrasi negara-negara pascakolonial ke dalam sistem internasional, dan pertumbuhan perdagangan antar negara telah menciptakan tantangan baru bagi ibu kota, terutama di negara berkembang. Selain itu, pemanasan global telah menciptakan risiko baru bagi beberapa ibu kota, contohnya adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir yang melanda Jakarta, Indonesia. *Kedua*, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi

telah secara signifikan mempengaruhi biaya pemindahan ibu kota (Reva, 2016).

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pemindahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang timbul antara lain terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, *social security*, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.

Dalam bidang *social security*, pemindahan Ibu Kota Negara memberikan dampak yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yakni manakala pusat pemerintahan serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya melakukan migrasi atau perpindahan, tentu akan menimbulkan *social effect* bagi masyarakat di daerah eks ibu kota lama maupun masyarakat di daerah ibu kota baru. Aspek kesiapan

masyarakat pun tak dapat dihindarkan. Perpindahan masyarakat tersebut juga berpotensi menimbulkan adanya akulturasi maupun inkulturasi budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kajian ini dilakukan untuk membahas dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap *social security*.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 *Social security*

Pengertian *social security* (jaminan sosial) dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melindungi kaum miskin dan lemah dari perubahan yang merugikan dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki standar hidup yang dapat diterima (Dasgupta, 1997).

Dalam literatur pekerjaan sosial (*social work*), jaminan sosial (*social security*) merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem, dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, dan karenanya memiliki sistem dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula (Faizal Aco dan Widane, 2020).

Kata “Jaminan sosial” berasal dari kata *social* dan *security*. *Security* diambil dari Bahasa Latin “*se-curus*” yang bermakna “*se*”

(pembebasan atau liberation) dan “*curus*” yang berarti (kesulitan atau uneasiness). Sementara itu, kata “*social*” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.”

Jaminan sosial merupakan bentuk solidaritas sosial kepada anggota masyarakat, terutama kelompok lemah atau rentan (*vulnerable groups*). Negara adalah representasi masyarakat yang bertanggungjawab dalam membantu kelompok ini, yang karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil (Suharto, 2011).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadaai, mencegah, dan mengatasi terjadinya krisis, yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.

B.2 Ibu Kota Negara

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Ibu kota berasal dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) kemudian dikaitkan dengan kata *capitol* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual (Yahya, 2018).

Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan satu kota besar dalam negaranya menjadi ibu kota sebagai cerminan keunikan dari sisi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbudaya, berbangsa dan bernegara, sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam memperkenalkan karakter dan identitas suatu negara.

Ibu kota identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, keidentikan ini

menjadikan ibu kota sebagai kota tujuan urbanisasi. Negara-negara di dunia membangun ibu kotanya dengan cara yang berbeda-beda, dengan melanjutkan kota yang menjadi ibu kota di masa lalu atau membangun ibu kota baru di kota yang berbeda (Agassi, 2011).

Di awal tahun 2022, Pemerintah bersama dengan parlemen telah menyepakati dan menyetujui landasan hukum untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara. Setelah melewati banyak proses yang tidak sederhana dan mudah, serta memakan waktu yang tidak singkat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN), akhirnya secara resmi menjadi landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru yang berbentuk otorita dengan nama Nusantara (Parlementaria DPR RI, 2020 dalam Pusat Riset Politik, 2022).

B.3 Perpindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara, bersamaan dengan pembangunan negara dan bangsa, telah menjadi bagian penting dari pembentukan negara-negara pasca kolonial. Ada perdebatan nasional dan proyek-proyek besar tentang masalah ini di banyak negara - mulai dari Indonesia, Malaysia, Sri Lanka dan Pakistan di Asia; Pantai Gading, Tanzania,

Malawi dan Zimbabwe di Afrika; Brasil, Argentina dan Kosta Rika di Amerika Selatan. Bahkan di Afrika Selatan ada perdebatan tentang konsolidasi pusat eksekutif dan legislatif yang saat ini dibagi antara Pretoria / Tshwane dan Cape Town, dengan memindahkan Parlemen ke Pretoria. Namun, seiring waktu hanya beberapa negara yang telah melakukan relokasi aktual dan sebagian besar proyek telah ditunda tanpa batas waktu (Agassi, 2013).

Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang *smart, green, beautiful* dan *sustainable; modern* dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur (FISIP UI, 2020).

C. Metodologi Penelitian

C.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan historis, dimana peneliti membuat rekonstruksi masa lampau dengan mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis serta menyintesis bukti atau fakta yang ada dengan teliti sehingga mendapatkan gambaran yang tepat pada masa lampau (Yusuf, 2014).

C.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi pustaka (*library research*) yaitu mencari bahan-bahan kajian di perpustakaan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, berita maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait dengan judul penelitian ini guna mendapatkan petunjuk yang mendukung penelitian.

C.3 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,

yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

D. Hasil dan Pembahasan

Menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, bahwa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; mengubah mindset pembangunan dari Jawa-centric menjadi Indonesia-centric; memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila; dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terakhir adalah agar memiliki ibu kota negara yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Salah satu alasan pemilihan Pulau Kalimantan menjadi lokasi Ibu Kota Negara baru adalah karena letaknya yang strategis di tengah Indonesia. Dengan berpindahnya Ibu Kota Negara, maka semua pusat kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi

pejabat pemerintahan pun secara otomatis akan ikut berpindah. Hal ini diyakini dapat mengeliminasi permasalahan jarak yang selama ini terjadi dalam pengembangan kompetensi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan menimbulkan dampak baik dari segi infrastruktur, pemerintahan maupun dari masyarakat. Dalam kajian ini pembahasan dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap bidang *social security* dikategorikan dalam 2 jenis, yakni di daerah eks ibukota serta di daerah ibukota baru.

D.1 Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap *Social security* di Daerah Eks Ibukota

Gagasan wacana pemindahan ibu kota ini menuai banyak polemik di masyarakat, sebagai contoh ada yang pro dan ada yang kontra terhadap banjir di Jakarta, bagi yang terkena banjir berpendapat menginginkan ibu kota pindah, bagi yang tidak terdampak berpendapat tidak menginginkan ibu kota dipindahkan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menuturkan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta. Salah satunya terkait

faktor daya dukung. Kemudian faktor persebaran penduduk juga turut menjadi pertimbangan utama pemindahan ibu kota. Faktor berikutnya yaitu pemerataan pembangunan nasional. Dia menyatakan, berpindahnya ibu kota akan menjadi salah satu instrumen pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang saat ini sedang diusung pemerintah.

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan penduduk perkotaan dalam bidang ekonomi (perdagangan, pemasaran industry, keuangan, perbankan, dan jasa perkotaan lainnya), dalam bidang sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dan interaksi social lainnya), dan dalam bidang administrasi pemerintahan (birokrasi, pembangunan daerah, layanan publik, dan administrasi pemerintahan lainnya). Berbagai kegiatan perkotaan tersebut melibatkan peran serta sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya lainnya untuk melakukan produksi, menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adanya perpindahan Ibu Kota Negara mengakibatkan berkurangnya kepadatan di Jakarta. Baik itu kepadatan penduduk maupun kepadatan dalam aktivitas pembangunan. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang bertahan di daerah

Jakarta. Dimana kepadatan perkotaan yang dirasakan dapat berkurang, serta kepadatan dalam aktivitas pembangunan pun juga berkurang. Secara tidak langsung, hal ini juga berdampak dalam berkurangnya persaingan dalam mencari pekerjaan.

Di kota Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, terdapat kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi (di atas 10 persen), sedangkan prasarana yang tersedia terbatas, pembangunan jalan baru sangat lambat pertambahannya (hanya 0,05 persen), Hal ini dipastikan akan mengakibatkan kepadatan lalu lintas bertambah tinggi, dan pada beberapa ruas jalan akan meningkat menjadi kemacetan lalu lintas (Adisasmita dan Adisasmita, 2011).

Dengan perpindahan Ibu Kota Negara yang diikuti oleh perpindahan masyarakat, secara tidak langsung juga akan mengurangi tingkat kepadatan kendaraan dan polusi yang dihasilkan. Sehingga hal tersebut juga memberikan dampak yang positif dimana udara di daerah eks ibu kota (Jakarta) menjadi lebih bersih dan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor pun berkurang.

Pembangunan perkotaan yang sangat massif dan intensif, yang ditunjukkan oleh pembangunan gedung dan bangunan permanen, meliputi rumah penduduk yang

sangat banyak jumlahnya, karena jumlah penduduk perkotaan bertambah terus, di samping itu terdapat banyak gedung-gedung bertingkat tinggi (seperti hotel, apartemen, kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan lainnya, demikian pula industri besar) semuanya bangunan itu tentunya membutuhkan air dalam volume besar, cara yang paling mudah serta murah adalah membangun instalasi yang menyedot air tanah dalam volume yang sangat besar.

Pengambilan air tanah dalam volume yang sangat besar, dampaknya akan menurunkan permukaan tanah secara meyakinkan. Di Jakarta dan sekitarnya banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, yang melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar, maka tidak diherankan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan yang cukup berarti (Adisasmita dan Adisasmita, 2011). Pemandahan Ibu Kota Negara juga memberi dampak berkurangnya eksploitasi terhadap tanah dan sumber air yang selama ini terjadi sehingga kualitas air bersih di Jakarta dapat menjadi lebih baik.

D.2 Dampak Pemandahan Ibu Kota Negara terhadap *Social security* di Daerah Ibu Kota Baru

Pemandahan IKN ke lokasi yang baru diharapkan membawa dampak baik bagi

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi harapan ke depan berkenaan dan sejalan dengan niat Pemerintah di balik pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan bahwa total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara.

Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara.

Pemandahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya pejabat pemerintahan namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya.

Dalam rencana pemindahan pejabat pemerintahan, misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun). Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya (Pusat Riset Politik, 2022).

Perpindahan pejabat pemerintahan beserta keluarganya pada akhirnya juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan seperti hunian, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Sehingga permasalahan pemerataan pembangunan di daerah pun dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disampaikan sebelumnya yakni untuk mengatasi pertumbuhan daerah yang sebelumnya tidak merata sehingga dapat teratasi dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya

budaya-budaya Jawa ke masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dapat terjadi pergeseran budaya atau adat istiadat. Dengan kata lain, dapat juga terjadi meleburnya budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan masyarakat asal (Daya) menjadi sebuah akulturasi budaya.

E. Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan dampak positif terhadap *social security* bagi masyarakat baik di daerah eks Ibu Kota (DKI Jakarta) maupun untuk masyarakat di daerah Ibu Kota Negara baru (Kalimantan Timur).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, R. dan Adisasmita, S. A. 2011. *Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agassi, E. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Dasgupta, P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washinton DC: The World Bank.
- Faizal Aco, dan Widane, GD R. 2018. *Pengembangan Social security Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Social Dalam Mega Proyek New Yogyakarta*

- International Airport. *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 2, No. 1, hal 38-53.
- FISIP UI. 27 Februari 2020. Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Pusat Riset Politik. 28 Maret 2022. Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Diakses dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dampak-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pengembangan-kompetensi-aparatur-sipil-negara/>.
- Reva, D. 2016. Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan,” Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS), University Of Pretoria Faculty Of Humanities: Department of Political Sciences.
- Ridho, A. J. 2020. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suharto, E. 2011. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sutikno. 2007. Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana (Pusat Studi Bencana). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yahya, H.M. 2018. Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*). Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Yusuf, A. M. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.